

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap tanah kas desa telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
2. Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa telah mewujudkan kepastian hukum yaitu dengan dibentuk tim pengawasan pemanfaatan tanah kas desa dalam melaksanakan pengawasan berdasarkan SK Bupati. Dibentuknya tim dalam pelaksanaan pengawasan tersebut dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan manfaatnya

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Diharapkan agar Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap tanah kas desa sebaiknya 1 tahun sekali agar pemanfaatan dan perubahan tanah kas desa sesuai dengan

peraturan yang ada. Apabila terlalu lama maka banyak terjadi pelanggaran pemanfaatan tanah kas desa.

2. Diharapkan agar Kecamatan tidak hanya merekomendasi terhadap permasalahan pemanfaatan tanah kas desa saja namun secara langsung melakukan pengawasan terhadap tanah kas desa. Kecamatan melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi karena menjadi tim pengawasan dan pemanfaatan tanah.
3. Diharapkan agar Pemerintah Desa dalam melakukan pemanfaatan dan penggunaan tanah kas desa sesuai dengan fungsinya, dan pemerintah Desa secara langsung melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kas desa yang telah beralih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zainie, 1997, *Pengelolaan Kekayaan Desa*, Alumni : Jakarta
- Agum Gumelar, 1999, *Kebijakan Agraria dari Prespektif Pertanahan Keamanan Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT. Gramedia : Jakarta
- Andari,Wicaksana 1996, *Pengembangan Agropolitan, Menuju Siasat Baru Perencanaan Regional di Asia*, Fakultas Pemerintahan Universitas Indonesia : Jakarta
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan 3, Balai Pustaka : Jakarta
- Djohermansyah,Djohan 1997, *Fenomena Pemerintahan*, Yarsif Watampone : Jakarta
- Eko,Boediman 2008, *Pemanfaatan Tanah Kas Desa*, Mandar Maju : Jakarta
- Erwiningsih,Winahyu 2005, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, UII : Jakarta
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dulaisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Hilman Hadikusuma , 2000, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni : Bandung
- Haris Syamsudidin, 2002, *Otonomi Daerah Demokratisasi dan Pendekatan Alternatif Resolusi Konflik Pusat Daerah*, Kompas : Jakarta
- Kartini Muljadi, 2007, *Hak hak Atas Tanah*, Kreasindo : Jakarta
- Maria Wulandari Soemardono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, edisi pertama, Kompas: Jakarta
- Pamudji. S, 1986, *Pelaksanaan Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah Didalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, PT. Gramedia: Jakarta
- Rismandha Imawan, 2002, *Pelestarian Kekayaan Desa*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Sembiring, 1999, *Pengelolaan Kekayaan Desa*, Edisi Pertama, Widya Bumi : Jakarta
- Soetardjo Kartohadi, 2002, *Desa*, Kencana : Jakarta
- Widiarti Ana, 1997, *Otonomi Daerah*, Kencana : Jakarta

Website

<http://bapeda.slemankab.go.id>

http://bppd.slemankab.go.id/?mod=detail_artikel

<http://dppd.slemankab.go.id>

<http://www.google.co.id>

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, KBBI Daring

Hasil Penelitian

Didit Azhari, *Kinerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) Kabupaten Sleman dalam melaksanakan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman*. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Yogyakarta

Rosaria Sidabutar, *Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah Kas Desa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Di Kabupaten Sleman*. Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta. Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen ke-4, Pasal 33 ayat (3) Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043,

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4385,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin
Peruntukan Penggunaan Tanah, Lembar Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2001 Nomor 11 Seri B.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Lampiran Nomor
XXVII Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian dan Pembatalan
Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Sleman No. 22 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, Dan
Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah